MEDIC NUTRICIA

Jurnal Ilmu Kesehatan

ISSN : 3025-8855

Vol. 23 No 4 Tahun 2026

Cahaya Ilmu Bangsa

KONTRASEPSI PASCAPERSALINAN PADA IBU NIFAS: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI EFEKTIVITAS, PEMILIHAN METODE, DAN STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN

Lisna Ferta Sari

[1] Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : lisnahasanbasri05@gmail.com

ABSTRAK

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menurun dari 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 189 pada tahun 2020, namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 183 pada tahun 2024 dan 70 pada tahun 2030. Kontrasepsi pascapersalinan (KB Pascapersalinan/KBPP) merupakan salah satu intervensi strategis untuk menekan AKI melalui pencegahan kehamilan berisiko akibat jarak kelahiran yang terlalu dekat, namun cakupannya di Indonesia masih rendah meskipun sekitar 90% persalinan telah ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan. Tinjauan pustaka ini bertujuan merangkum bukti terkini mengenai jenis, efektivitas, faktor penentu pemilihan, serta strategi peningkatan cakupan kontrasepsi pascapersalinan pada ibu nifas. Penelusuran dilakukan terhadap publikasi nasional dan internasional tahun 2020–2026 dari basis data seperti data resmi Kementerian Kesehatan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta jurnal ilmiah terindeks. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan implan pascapersalinan direkomendasikan sebagai lini pertama pada ibu menyusui karena tidak memengaruhi produksi ASI, sementara metode hormonal progestin kini dinyatakan dapat digunakan sejak periode pascapersalinan dini menurut rekomendasi WHO terbaru. Faktor pengetahuan, dukungan suami, persepsi, riwayat penyakit penyerta, dan akses layanan terbukti berhubungan signifikan dengan pemanfaatan KBPP. Angka unmet need KB di Indonesia bertahan pada kisaran 10–11,5% sejak tahun 2000 dan menjadi tantangan utama. Edukasi dan konseling terstruktur pada masa antenatal dan masa nifas terbukti secara konsisten meningkatkan pengetahuan dan minat ibu nifas terhadap KBPP. Diperlukan penguatan konseling KB sejak masa kehamilan, keterlibatan suami, serta pemerataan akses layanan MKJP hingga ke fasilitas kesehatan primer untuk menekan unmet need dan mempercepat penurunan AKI.

Kata Kunci: *kontrasepsi pascapersalinan; ibu nifas; keluarga berencana; unmet need; edukasi kesehatan*

Article History

Received: Agustus 2026

Reviewed: Agustus 2026

Published: Agustus 2026

Plagirism Checker No 234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MEDIC NUTRICIA

Jurnal Ilmu Kesehatan

ISSN : 3025-8855

Vol. 23 No 4 Tahun 2026

Cahaya Ilmu Bangsa

ABSTRACT

Indonesia's Maternal Mortality Rate (MMR) declined from 305 per 100,000 live births in 2015 to 189 in 2020, yet remains far above the national mid-term development plan targets of 183 by 2024 and 70 by 2030. Postpartum contraception is a key strategic intervention to reduce MMR by preventing high-risk pregnancies caused by short birth intervals, but its coverage in Indonesia remains low even though approximately 90% of deliveries are attended in health facilities. This literature review aims to summarize current evidence on the types, effectiveness, determinants of method selection, and strategies to improve postpartum contraception coverage among puerperal women. A search was conducted on national and international publications from 2020–2026, including official data from the Indonesian Ministry of Health, the National Population and Family Planning Board (BKKBN), and indexed scientific journals. The review found that long-acting reversible contraceptives (LARC), such as postpartum intrauterine devices and implants, are recommended as first-line options for breastfeeding mothers as they do not affect milk supply, while updated WHO recommendations now state that progestin-based hormonal methods can be initiated from the early postpartum period. Knowledge, husband's support, perception, comorbidities, and service access were significantly associated with postpartum contraceptive uptake. Indonesia's unmet need for family planning has remained around 10–11.5% since 2000, representing a major challenge. Structured education and counseling during the antenatal and postpartum periods consistently improved knowledge and interest among puerperal women. Strengthening family planning counseling from pregnancy, involving husbands, and expanding equitable access to LARC services at primary health facilities are needed to reduce unmet need and accelerate MMR reduction.

Keywords: *postpartum contraception; puerperal women; family planning; unmet need; health education*

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Tren AKI menunjukkan penurunan dari 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 189 pada tahun 2020, tetapi capaian tersebut masih jauh dari negara-negara tetangga di kawasan ASEAN yang rata-rata berada pada kisaran 24–27 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah menetapkan target penurunan AKI melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, dan 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Salah satu penyebab dasar AKI yang terus menjadi perhatian adalah pola 4T, yakni terlalu muda,

terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat jarak antar kehamilan, yang sebagian besar dapat dicegah melalui pengaturan jarak kehamilan menggunakan kontrasepsi.

Kontrasepsi pascapersalinan (KB Pascapersalinan/KBPP) adalah pemakaian metode kontrasepsi yang dimulai sejak segera setelah persalinan hingga 12 bulan pertama masa pascapersalinan, sebagai upaya mencegah kehamilan yang terlalu cepat setelah melahirkan. Periode ini strategis karena kesuburan seorang ibu dapat kembali secara tidak terduga, bahkan sebelum menstruasi pertama muncul kembali, termasuk pada ibu yang menyusui secara eksklusif. Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa capaian KBPP di Indonesia masih rendah, padahal sekitar 90% ibu bersalin telah ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) oleh tenaga kesehatan, sehingga peluang edukasi dan pelayanan KBPP terintegrasi sesungguhnya sangat terbuka lebar (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mencatat capaian kesertaan ber-KB untuk seluruh metode sebesar 63,6%, dengan peserta KB cara modern sebesar 57,2%, yang justru menurun dibandingkan hasil SDKI 2012 sebesar 57,9%. Meskipun demikian, capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan dari 18,2% (SDKI 2012) menjadi 23,3% (SDKI 2017) (BKKBN, BPS, Kemenkes RI, & ICF, 2018). Secara khusus untuk metode Amenore Laktasi (MAL/LAM) sebagai metode kontrasepsi alami pascapersalinan, capaian penggunaannya baru mencapai 13% dari target sekitar 70% yang ditetapkan pemerintah, menunjukkan besarnya kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan aktual (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022).

Rendahnya cakupan KBPP berkontribusi terhadap tingginya angka unmet need KB di Indonesia, yaitu proporsi Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran namun tidak menggunakan kontrasepsi. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN tahun 2023, angka unmet need nasional tercatat sebesar 11,5%, dan pakar kependudukan menyebutkan bahwa angka ini tidak banyak berubah sejak tahun 2000 hingga sekarang, yakni bertahan pada kisaran 10% (BKKBN, 2024; Universitas Indonesia, 2023). Alasan kesehatan menjadi penyebab unmet need paling dominan, mencapai 55,97% dari total kasus, diikuti oleh keterbatasan akses layanan, jarak tempat pelayanan yang jauh, dan biaya (Action Research Literate, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tinjauan pustaka ini disusun untuk merangkum bukti ilmiah terkini mengenai jenis dan efektivitas metode kontrasepsi pascapersalinan, faktor-faktor yang memengaruhi pemilihannya, serta peran edukasi dan konseling dalam meningkatkan cakupan KBPP, sebagai dasar penguatan praktik kebidanan berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan ibu nifas.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode tinjauan pustaka naratif (narrative literature review). Penelusuran pustaka dilakukan terhadap dokumen resmi pemerintah (Kementerian Kesehatan RI, BKKBN, BPS) serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2026, dengan beberapa rujukan dasar yang lebih lama digunakan untuk data acuan historis (SDKI 2012 dan 2017). Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi kombinasi istilah "kontrasepsi pascapersalinan", "KB pascapersalinan", "postpartum contraception", "postpartum family planning", "unmet need KB", dan "edukasi KB ibu nifas". Kriteria inklusi meliputi artikel

berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas jenis, efektivitas, determinan pemilihan, atau intervensi edukasi terkait kontrasepsi pascapersalinan, baik berupa penelitian primer, tinjauan pustaka, maupun laporan kebijakan/data resmi. Artikel yang tidak relevan dengan topik ibu pascapersalinan atau tidak dapat diakses teks lengkapnya dikeluarkan dari pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disintesis secara tematik ke dalam beberapa subtopik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi dan Waktu Ideal Pemakaian Kontrasepsi Pascapersalinan

Kontrasepsi pascapersalinan penting diberikan sejak dini karena kembalinya kesuburan pascapersalinan sulit diprediksi. Pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi pertama dapat terjadi sesingkat 34 hari setelah persalinan, sehingga tanpa proteksi kontrasepsi, risiko kehamilan berulang dalam interval yang terlalu dekat (short interpregnancy interval) meningkat signifikan (ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2025). Kehamilan dengan jarak yang terlalu rapat berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, hingga peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, konseling KBPP idealnya telah dimulai sejak masa kehamilan (antenatal), dilanjutkan segera setelah persalinan, dan dikuatkan kembali pada masa nifas serta kunjungan pascasalin, bukan hanya ditawarkan pada satu titik waktu saja.

2. Jenis Metode Kontrasepsi Pascapersalinan dan Rekomendasi Terkini

Metode Amenore Laktasi (MAL) merupakan metode kontrasepsi alami berbasis menyusui eksklusif yang efektif, tidak berbiaya, dan tidak menimbulkan efek samping, namun hanya efektif selama tiga syarat terpenuhi secara bersamaan, yaitu ibu belum menstruasi kembali, bayi disusui secara eksklusif tanpa makanan/minuman tambahan, dan usia bayi kurang dari enam bulan. Program edukasi MAL pada ibu nifas terbukti meningkatkan skor pengetahuan secara bermakna, dari kategori cukup menuju kategori baik setelah penyuluhan diberikan (Andriyani dkk., 2024).

Metode kontrasepsi jangka panjang (Long-Acting Reversible Contraception/LARC), yaitu Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) dan implan, kini menjadi rekomendasi lini pertama bagi ibu menyusui karena efektif, aman, dan tidak terbukti mengganggu kuantitas maupun kualitas ASI. Rekomendasi WHO edisi 2025 menegaskan bahwa AKDR tembaga maupun AKDR berlevonorgestrel dapat dipasang segera dalam 48 jam pertama pascapersalinan (post-plasenta) maupun setelah 4 minggu, dengan catatan pemasangan post-plasenta memiliki risiko ekspulsi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pemasangan pada interval tersebut (Grandi dkk., 2024; Lactasource/WHO, 2025). Menariknya, kondisi menyusui pada saat pemasangan AKDR pascapersalinan justru berhubungan dengan penurunan risiko ekspulsi hingga sekitar 30%, diduga akibat efek protektif MAL terhadap kontraksi uterus (Grandi dkk., 2024).

Untuk metode hormonal, pembaruan rekomendasi WHO 2025 melonggarkan kehati-hatian yang sebelumnya berlaku pada penyuntikan DMPA sebelum 6 minggu pascapersalinan, sehingga kini kategori tersebut dinyatakan "dapat umumnya digunakan" pada ibu menyusui. Secara umum, metode berbasis progestin saja (pil progestin, suntik, dan implan) dinyatakan kompatibel dengan menyusui dan dapat dimulai sejak beberapa hari pertama pascapersalinan tanpa dampak klinis bermakna terhadap pertumbuhan bayi, meskipun perlu dilakukan pemantauan

pola perdarahan dan edukasi mengenai kemungkinan perpanjangan masa amenore (Lactasource/WHO, 2025).

Data distribusi metode KBPP di lapangan menggambarkan pola pemilihan yang masih didominasi metode jangka pendek. Di wilayah Banyumas misalnya, dari total akseptor KBPP tahun 2020, metode suntik menjadi pilihan terbanyak (41,9%), diikuti AKDR (29,4%), implan (17,8%), Metode Operasi Wanita/MOW (5,0%), kondom (3,6%), pil (2,2%), dan Metode Operasi Pria/MOP yang praktis tidak digunakan (0,0%) (Deskripsi Ketersediaan Alokon KBPP Banyumas, 2023). Pola ini konsisten dengan temuan di berbagai wilayah lain di Indonesia yang menunjukkan preferensi terhadap metode non-permanen dan jangka pendek, meskipun MKJP secara klinis lebih direkomendasikan untuk menjamin efektivitas pencegahan kehamilan dalam interval yang lebih panjang.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Kontrasepsi Pascapersalinan

Beberapa penelitian terbaru mengidentifikasi determinan pemanfaatan KBPP secara konsisten. Penelitian di Puskesmas Tasinifu, wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, menemukan hubungan bermakna antara pengetahuan (p=0,002), dukungan suami (p=0,000), dan persepsi ibu (p=0,000) terhadap pemanfaatan kontrasepsi pascapersalinan, sementara usia, paritas, dan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna (Ximenes dkk., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa faktor psikososial dan edukasi memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor demografis semata.

Studi lain berbasis data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa riwayat penyakit penyerta turut memengaruhi pemilihan kontrasepsi hormonal pascapersalinan, dengan riwayat hipertensi sebagai faktor paling dominan (OR=2,42), diikuti riwayat asma (OR=1,96) dan tempat tinggal (OR=1,39) (PrimA: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 2026). Hal ini menggarisbawahi pentingnya skrining kondisi medis ibu sebelum konseling metode kontrasepsi hormonal, sejalan dengan kriteria kelayakan medis (medical eligibility criteria) yang direkomendasikan WHO.

Dari sisi ketersediaan layanan, studi implementasi program KBPP di wilayah pedesaan Rwanda mengungkapkan bahwa cakupan pemasangan AKDR pascapersalinan (PPIUD) jauh lebih rendah dibandingkan implan pascapersalinan; rumah sakit rujukan hanya menyediakan rata-rata 7 pemasangan PPIUD per bulan atau setara 1% dari total persalinan, dibandingkan 204 pemasangan implan per bulan atau 29% dari total persalinan. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih memasang AKDR dibandingkan implan, serta minimnya pemahaman pasangan mengenai mekanisme kerja dan efek samping AKDR (Umuhoza dkk., 2025). Pola serupa turut ditemukan pada berbagai studi di negara berkembang lain, yang menunjukkan bahwa penerimaan (acceptance) IUCD pascapersalinan meningkat signifikan apabila konseling terfokus diberikan sejak masa antenatal dibandingkan konseling rutin standar (studi RCT di pusat rujukan tersier, 2023).

4. Peran Edukasi dan Konseling dalam Meningkatkan Cakupan KBPP

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian intervensi di Indonesia secara konsisten membuktikan bahwa edukasi terstruktur mampu meningkatkan pengetahuan dan minat ibu nifas terhadap KBPP secara bermakna. Kegiatan penyuluhan metode MAL pada ibu nifas di Lampung menunjukkan peningkatan skor pengetahuan dari kategori cukup (skor rata-rata 68) sebelum penyuluhan menjadi kategori baik setelahnya (Andriyani dkk., 2024). Pada kegiatan edukasi masa nifas dan konseling pengambilan keputusan KBPP di Pringsewu, tingkat

pemahaman ibu terhadap tanda bahaya nifas mencapai 92% dan sebanyak 85% ibu mampu menentukan pilihan metode kontrasepsi secara mandiri setelah sesi konseling (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2026).

Studi lain melaporkan bahwa kesadaran umum ibu terhadap kontrasepsi pascapersalinan sebagai metode pencegahan kehamilan dan manfaatnya sudah cukup baik, mencapai 90,3% responden, meskipun demikian pengetahuan yang baik saja belum tentu berbanding lurus dengan pemanfaatan aktual apabila tidak diiringi dukungan lingkungan sosial dan akses layanan yang memadai (Jurnal Life Birth, 2025). Hal ini memperkuat argumen bahwa strategi peningkatan cakupan KBPP perlu bersifat multikomponen, mencakup edukasi berulang sejak masa antenatal, pelibatan aktif suami dan keluarga dalam sesi konseling, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang memadai di fasilitas kesehatan, serta pelatihan tenaga kesehatan dalam pemasangan MKJP pascapersalinan.

5. Tantangan dan Kesenjangan (Unmet Need) KB Pascapersalinan

Meskipun berbagai intervensi edukasi menunjukkan hasil positif dalam skala kegiatan tertentu, secara nasional angka unmet need KB di Indonesia belum menunjukkan perbaikan berarti dalam dua dekade terakhir, bertahan pada kisaran 10–11,5% (BKKBN, 2024; Universitas Indonesia, 2023). Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya kehamilan tidak diinginkan yang pada gilirannya meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu. Alasan kesehatan menjadi penyebab dominan unmet need (55,97%), diikuti keterbatasan jarak layanan, biaya, dan ketersediaan alokon (Action Research Literate, 2024). Disparitas cakupan KBPP antarwilayah juga masih terlihat jelas, misalnya cakupan KBPP di Jawa Tengah tercatat 26,8%, dengan variasi antar kabupaten dari 34,2% (Cilacap) hingga 37,1% (Banyumas) (Deskripsi Ketersediaan Alokon KBPP Banyumas, 2023), yang menunjukkan bahwa faktor lokal seperti dukungan kebijakan daerah dan kesiapan fasilitas turut memengaruhi capaian program.

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah tingginya angka putus pakai (discontinuation) kontrasepsi jangka pendek dan rendahnya keterlibatan pria dalam program KB. Data SDKI 2017 mencatat hanya 2,5% pria yang mengandalkan kondom sebagai metode kontrasepsi dan hanya 0,05% yang menjalani vasektomi (MOP), mencerminkan masih rendahnya partisipasi pria dalam tanggung jawab kontrasepsi pascapersalinan di Indonesia (Journal Universitas Pahlawan, 2025).

KESIMPULAN

Kontrasepsi pascapersalinan merupakan intervensi strategis dan berbasis bukti untuk menekan Angka Kematian Ibu melalui pencegahan kehamilan dengan interval yang terlalu dekat, namun cakupannya di Indonesia masih rendah dan angka unmet need KB bertahan pada kisaran 10–11,5% sejak tahun 2000. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR dan implan pascapersalinan terbukti aman, efektif, dan tidak mengganggu proses menyusui, sehingga direkomendasikan sebagai pilihan lini pertama sesuai rekomendasi WHO terbaru, sementara metode hormonal progestin kini juga dinyatakan dapat digunakan sejak periode pascapersalinan dini. Pemilihan metode kontrasepsi pascapersalinan dipengaruhi secara bermakna oleh tingkat pengetahuan ibu, dukungan suami, persepsi, riwayat penyakit penyerta, serta ketersediaan dan akses layanan kesehatan. Edukasi dan konseling terstruktur yang dimulai sejak masa antenatal dan dilanjutkan pada masa nifas terbukti secara konsisten meningkatkan pengetahuan dan kemandirian ibu dalam menentukan pilihan kontrasepsi. Diperlukan penguatan program konseling KB sejak kehamilan, pelibatan aktif suami dan keluarga, pemerataan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemasangan

metode kontrasepsi jangka panjang pascapersalinan hingga ke fasilitas kesehatan primer, guna menurunkan unmet need dan mempercepat pencapaian target penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Action Research Literate. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need (analisis berdasar hasil capaian data pemutakhiran keluarga tahun 2023). Action Research Literate, 8(7).

Andriyani, D., dkk. (2024). Penyuluhan kontrasepsi metode amenorea laktasi (MAL) guna meningkatkan pengetahuan ibu nifas. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan RI, & ICF. (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Jakarta: BKKBN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN Tahun 2024. Jakarta: BKKBN.

Deskripsi Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Puskesmas Wilayah Banyumas. (2023). Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Grandi, G., Del Savio, M. C., Facchinetti, F., & Fruzzetti, F. (2024). Postpartum contraception: A matter of guidelines. International Journal of Gynecology & Obstetrics. https://doi.org/10.1002/ijgo.14928

Guye, A. H., Kanea, E. B., Nigussie, T., Girma, D., & Shambi, D. B. (2023). Utilization of immediate postpartum intrauterine device and its associated factors among women who gave birth in public hospitals in West Wollega Zone, Oromia, Ethiopia. Frontiers in Medicine, 10, 1238496. https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1238496

Jurnal Life Birth. (2025). Pengetahuan dan kesadaran ibu tentang kontrasepsi pascapersalinan. Jurnal Life Birth, 9(2).

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Bagimu Negeri. (2026). Pemberdayaan ibu pasca salin melalui edukasi masa nifas dan konseling pengambilan keputusan KB pasca salin berbasis keislaman di BPM Kabupaten Pringsewu. Bagimu Negeri: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 10(1).

Jurnal Universitas Pahlawan. (2025). Faktor determinan partisipasi pria menjadi akseptor program keluarga berencana di Indonesia (analisis data SDKI tahun 2017). Jurnal Kesehatan Tembusai, 6(2).

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Kemenkes fokus tingkatkan KB pascapersalinan turunkan stunting dan AKI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Perkuat pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. Jakarta: Kemenko PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). Penurunan angka unmet need turunkan Angka Kematian Ibu. Jakarta: Kemenko PMK.

Lactasource. (2026). Contraception and breastfeeding: 2025 WHO recommendations. Diakses dari https://www.lactasource.com

PrimA: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan. (2026). Faktor determinan pemilihan alat kontrasepsi pasca salin oleh ibu di Jawa Tengah (analisis data SKI 2023). PrimA: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan.

Umuhoza, C., Niang, M. D., Ingabire, R., Nyombayire, J., Mazzei, A., Parker, R., Tichacek, A., Sales, J. M., Haddad, L. B., Corso, P., Allen, S., Karita, E., Wall, K. M., & Azmat, S. K. (2025). Implementing postpartum family planning services in rural Rwanda: A mixed-methods study. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338627

Universitas Indonesia. (2023). Pakar UI: Angka unmet need jadi tantangan program keluarga berencana. Jakarta: ANTARA News.

Ximenes, C. de S., Mado, F. G., Larasati, G. W. K. D., & Sirait, R. W. (2025). Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan kontrasepsi pasca persalinan di Puskesmas Tasinifu Wilayah Perbatasan Indonesia–Timor Leste. SEHATRAKYAT (Jurnal Kesehatan Masyarakat), 4(4), 1041–1056.